

Komunikasi Politik dalam Perombakan Kabinet Bersatu Jilid Dua

Miskin kinerja hasil polling pemerintah di kementerian kepercayaan publik menurun, refleksi dalam bentuk kritik dan opini publik sebagai kebijakan pemerintah dalam komunikasi politik yang tidak mampu memenuhi harapan masyarakat. Kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah dalam perombakan kabinet bersatu jilid dua adalah langkah-langkah reformasi mendasar pemerintah, teliti, konsisten, agenda yang jelas untuk meningkatkan tatanan politik, dan keadilan dalam penegakan hukum.

Kata kunci: Kinerja, Komunikasi Politik, Perombakan

(Political Communication in a Cabinet Reshuffle United Volume 2)

Poor performance of most government ministries result in a decline in public confidence, a reflection in the form of criticism and public opinion as a government policy of political communication that are not able to meet community expectations. Policies decided by the government in a cabinet reshuffle united volume two is a fundamental government reform measures, thorough, consistent, clear agenda to improve the political order, and justice in the rule of law.

Key word: Performance, Political Communication, Reshuffle

Oleh :

Bedjo Sukarno
Dosen Fisip Unisri

Pendahuluan

Masalah bangsa, Indonesia memerlukan pemimpin yang mampu untuk menata ulang negara, birokrasi, dan desentralisasi otonomi. Indonesia harus membuat rencana yang solid pada tahun mendatang termasuk membenahi perilaku elite. Dengan menyaksikan ketidakbenaran penyelenggara negara, terlihat menyangsikan bahwa para elite itu memiliki komitmen tinggi, bagaimana ketamakan dan kerakusan dipertontonkan dengan sangat vulgar. Sangat memprihatinkan terhadap kelakuan elite yang seperti itu karena tidak mencerminkan nilai-nilai budaya kita, demikian menurut Siti Zuhro peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan. (Kompas, 20/12/2011:8)

Selanjutnya dikatakan bahwa hal-hal buruk yang dilakukan elite di pusat ditransfer kepada elite di daerah, para elite di daerahpun meniru. Ketidakpercayaan diantara kita sudah

sangat tinggi dan mengkristal. Yang harus dilakukan dari perspektif dan komunikasi politik adalah penataan ulang, tetapi persepsi elite harus satu.

Korupsi bagaikan wabah yang menjalar di semua instansi dan lembaga pemerintah di semua tingkatan. Hukum tidak lagi ditakuti karena dapat dibeli dan diintervensi, oleh sebab itu diperlukan adanya keberanian pemerintah untuk bertindak tegas agar kepercayaan masyarakat pulih kembali. Banyak nyawa warga negara Indonesia mati sia-sia sebab pemerintah hanya bereaksi dari pada mengantisipasi datangnya musibah, seperti bencana alam, serangkaian kecelakaan transportasi, hukuman mati bagi tenaga kerja wanita Indonesia yang bekerja di negara lain, serta kekerasan di Ambon, Situasi Papua yang memanas menciptakan keprihatinan baru bangsa ini meskipun berbagai pendekatan telah dilakukan tetapi rantai kekerasan belum bisa disudahi, dan kini peristiwa yang aktual terjadi di Mesuji Lampung yang menambah panjang daftar kematian warga negara Indonesia.

Kabinet sudah menjadi beban pemerintahan sehingga hanya dengan mengganti menteri yang bermasalah akan menjadi kesempatan Presiden meraih kembali kepercayaan publik. Tiga tahun sisa masa pemerintahan akan menjadi penentu reputasi Susilo Bambang Yudhoyono yang akan dikenang rakyat, sedangkan penentuan siapa yang akan diganti adalah hak prerogative Presiden. Namun, belajar dari pengalaman SBY pasti akan mempertimbangkan aspek komunikasi dan komposisi politik demi menjaga soliditas pemerintahannya.

Artinya, separuh menteri negara dan pejabat setingkat menteri perlu dipertimbangkan untuk diganti jika SBY mendasarkan perombakan kabinet pada kinerja menteri. Kalaupun faktor kinerja menjadi parameter utama bagi SBY dalam mengevaluasi kabinet, mestinya juga didasarkan pada pencapaian riil para menteri sesuai target tahunan yang bersangkutan. Berkaitan dengan hal tersebut, laporan dari berbagai elemen masyarakat, media dan kalangan dunia usaha seharusnya menjadi bahan pertimbangan dalam merombak kabinet.

Fenomena tersebut di atas akan semakin parah jika tidak ada upaya perubahan dalam birokrasi, yang paling utama diharapkan terjadinya perubahan dalam kabinet bersatu jilid dua.

Komunikasi Politik

Komunikasi politik menyangkut dan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan individu, kelompok dan masyarakat pada umumnya. Individu dan kelompok politik berpotensi mampu mempengaruhi proses politik, atau juga mampu mendapatkan kekuasaan sebagai pembuat dan pelaksana keputusan politik, sehingga mendapatkan manfaat material dan non material yang besar dari keputusan politik. Mereka itu yang mempunyai dan mampu menggunakan sumber-sumber kekuasaan ke dalam kegiatan politik, seperti senjata, kewenangan/jabatan, kekayaan, sarana produksi, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, masa yang terorganisir dan moral.

Kedudukan komunikasi politik dinilai sangat bermakna dan berpengaruh pada keseluruhan sistem politik, hal ini tidak lain berkat tumbuhnya kesadaran bahwa bagaimanapun kehidupan politik sangat bergantung kepada komunikasi, bahkan secara politis kesadaran berkomunikasi juga semakin meningkat di kalangan eksekutif/pemerintah kita. Hal yang esensial sifatnya bahwa pentingnya suatu corak komunikasi yang memiliki wawasan politik guna meraih peran serta masyarakat seluas mungkin, bersifat sukarela dan aktif kreatif di dalam proses-proses pembangunan tak terkecuali pembangunan politik.

Politisi sebagai komunikator politik memainkan peran sosial yang utama, terutama dalam proses pembentukan opini publik. Politikus berkomunikasi sebagai wakil suatu kelompok dan pesan-pesan politikus itu adalah untuk mengajukan dan atau melindungi tujuan kepentingan politik. Artinya, politikus mencari pengaruh lewat komunikasi. (Lely Arrianie, 2010:17)

Karakterisasi opini publik merupakan aspek komunikasi politik, yang melukiskan opini publik sebagai proses yang menggabungkan pikiran, perasaan, dan usul yang diungkapkan oleh warga negara secara pribadi terhadap pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pemerintah

yang bertanggungjawab atas dicapainya ketertiban sosial dalam situasi yang mengandung konflik, perselisihan pendapat tentang apa yang akan dilakukan dan bagaimana melakukannya. Pokok dasar pikiran individu manusia tentang komunikasi politik ialah orang bertindak terhadap obyek berdasarkan makna obyek itu baginya. (Dan Nimmo, 1989:3)

Faktor tujuan dalam komunikasi politik itu, menurut Lord Windlsham dalam bukunya `What is Political Communication` (OnongUchjana Effendi, 1986:200) menjelaskan bahwa komunikasi politik adalah suatu penyampaian pesan politik yang secara sengaja dilakukan oleh komunikator kepada komunikan dengan tujuan membuat komunikan berperilaku tertentu. Sebelum suatu pesan politik dapat dikonstruksikan untuk disampaikan kepada komunikan dengan tujuan mempengaruhinya, dalam substansinya terdapat keputusan politik yang dirumuskan berdasarkan berbagai pertimbangan. Sebuah pesan yang menimbulkan efek kognitif pada komunikan, telah berhasil membuat komunikan mengerti, sehingga menjadi suatu informasi atau pengetahuan baginya.

Lebih tinggi lagi kadarnya dari efek tersebut adalah efek behavioral, karena pesan komunikasi tadi tidak saja berhasil membuat komunikan mengerti disertai perasaan tertentu, tetapi juga melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Efek behavioral bisa berupa kegiatan positif konstruktif, dapat pula merupakan tindakan negative destruktif. Dalam politik, tindakan yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang sebagai efek behavioral dari suatu pesan politik dapat berupa partisipasi dalam pembangunan, bisa juga merupakan tindakan sabotase atau makar.

Opini publik terjadi apabila sejumlah orang dalam masyarakat terlibat dalam suatu pergunjungan mengenai suatu masalah yang menarik perhatian mereka, tetapi bersifat kontroversial dalam artian diantara mereka yang pro dan ada yang kontra. Kenyataan dalam kehidupan politik menunjukkan, bahwa seorang pemimpin politik adalah orang yang memiliki

kemampuan memobilisasi opini publik, atau berkomunikasi. Opini publik amat penting dalam komunikasi politik, karena opini tidak menetap lama, kecuali jika khalayak merasa bahwa kepentingan pribadinya benar-benar tersangkut, atau apabila opini yang dibangkitkan dengan kata-kata diperkuat oleh peristiwa-peristiwa.

Media massa pun sudah canggih, yang membuat kadar keampuhannya menjadi semakin meningkat. Informasi mengenai apa saja yang terjadi di dunia bahkan di ruang angkasa muncul di setiap rumah dengan kecepatan yang teramat tinggi, bahkan dapat disaksikan pada saat peristiwa tengah terjadi. Begitu berkuasanya media massa dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku penduduk, sehingga Kevin Philips dengan bukunya `Responsibility in Mass Communication` (Onong Uchj. Effendi, 1986:206) mengatakan, bahwa era sekarang lebih merupakan *mediacracy* yakni pemerintahan media dari pada demokrasi pemerintah rakyat. Artinya, terdapat keseimbangan antara informasi pemerintah yang wajib diketahui rakyat melalui media massa dengan informasi yang ingin diketahui rakyat melalui media.

Khalayak yang kritis akan berusaha mencari saluran untuk menyampaikan pikiran dan perasaannya, di sinilah pentingnya demokratisasi komunikasi sebagai proses di mana individu merupakan partner yang aktif bukan hanya sebagai obyek komunikasi. Dari sekian banyak jenis media massa adalah pers yang paling berperan karena berfungsi sebagai penyalur pikiran dan perasaan masyarakat.

Rakyat masih menanti dan menaruh harapan bahwa pemerintah mempunyai kemauan dan serius menangani persoalan, jangan malah menimbulkan atau membuat resah.

Opini Rakyat tentang Kinerja Pemerintah

A.Lawrence Lowell (Dan Nimmo, 1989:40) dalam argumentasinya, menyatakan bahwa opini rakyat ditegakkan atas pandangan umum rakyat tentang yang diinginkan dari pemerintah serta penerimaan umum akan alat yang tepat untuk mencapai tujuan, atas dasar memiliki

maksud, aturan prosedur bersama, telah memiliki karakter dengan konsensus sejati sebagai kesadaran jiwa suatu bangsa.

Pada prinsipnya pendapat rakyat lebih banyak menitikberatkan pada masalah-masalah politik atau masalah yang dilatarbelakangi mempunyai dampak politik. Disamping itu peranan mass media merupakan kekuatan yang cukup ampuh dalam pembentukan opini rakyat, juga sebagai kekuatan yang dapat berfungsi dalam memperkenalkan ide revolusioner, dalam menentang ketidakberesan pemerintah dan skandal sosial, serta mengungkapkan berbagai kegiatan yang melawan Undang-Undang dan ketidakadilan.

Rakyat secara politis berkepentingan dan terlibat mencari informasi tentang perilaku pemegang kekuasaan, serta selalu mengikuti garis-garis umum kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Oleh karena itu, warga negara membuat kebijakan melalui pemberian suara dan pendapatnya kepada pejabat yang dipilih untuk menyesuaikan diri dengan kehendak rakyat. Opini rakyat itu menggambarkan dengan tepat segala jenis kepercayaan, pengharapan yang dimiliki oleh orang tentang masalah yang terjadi di masyarakat, sebab konstruksi personal opini sangat selektif.

Pejabat pemerintah hanya melaksanakan kehendak legislator, bukan membuat sendiri undang-undang, dukungan rakyat terhadap pemerintah menunjukkan bahwa pemerintah memenuhi keinginan rakyat dan pemerintah mempunyai kekuasaan dan pengetahuan untuk menghasilkan apa yang diinginkan rakyat. Tetapi keadaan pemerintahan sekarang telah dua tahun berjalan menunjukkan implementasinya kabinet bersatu jilid dua dapat digambarkan seperti yang dijelaskan oleh pendapat dari berbagai elemen masyarakat, berikut ini.

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono semakin tergerus, mayoritas masyarakat merasa tidak puas dengan hasil kinerja pemerintah setelah dua tahun menjalankan pemerintahan. Menurut peneliti Lingkaran Survey Indonesia yang disampaikan oleh Ardian Sopa (Kompas, 17/10/2011)

dijelaskan bahwa saat ini tingkat kepuasan masyarakat kepada pemerintah merosot ke angka 46,2 persen, pertama disebabkan pemerintah tidak mampu memenuhi harapan masyarakat terutama dalam lima bidang pembangunan yakni ekonomi, hukum, politik, luar negeri dan bidang sosial, sedang penyebab yang kedua adalah melemahnya politik pendukung partai democrat.

Terbukanya kasus korupsi yang diduga melibatkan anggota kabinet di kementerian termasuk yang mempengaruhi buruknya citra pemerintahan secara keseluruhan. Sejak awal pemerintahan, rakyat sebetulnya menaruh harapan tipis kepada menteri Kabinet Bersatu jilid dua, tetapi semakin sinis seiring berjalannya waktu.

Soal tiadanya ketegasan dan pembiaran atas sejumlah peristiwa yang seharusnya memerlukan campur tangan negara jadi titik rawan dari pemerintah yang kerap dinilai tidak cocok dengan situasi sosial saat ini. Namun, tampaknya situasi sosial yang berubah cepat membawa ekspektasi baru yang sulit diimbangi dengan hanya modal kepribadian santun, tetapi ketegasan, kecepatan, dan kepemimpinan kuat kian menjadi magnet yang mengarahkan keinginan rakyat pada sebuah sosok harapan baru dalam pemerintahannya ke depan.

Jika demikian, mungkin harus dilakukan bersamaan meningkatkan kualitas kabinet lewat pergantian menteri, mengubah pola kepemimpinan presiden, dan menggariskan secara jelas sebuah gagasan besar bagi arah negara ini.

Perombakan Kabinet Bersatu Jilid Dua

Sesungguhnya perombakan bukan tuntutan rakyat, yang dituntut adalah pembasmian korupsi secara tegas, lugas dan tuntas hingga keakarnya. Secara etika politik, selain menunjukkan kecabulan juga memamerkan ketamakan tak bermalu akan kekuasaan, tak peduli pada penilaian masyarakat maupun unit kerja presiden yang menyebutkan mutu kinerja para menteri hasilnya sangat di bawah harapan yang dikehendaki masyarakat.

Ada tiga perspetif yang berkaitan dengan reshuffle kabinet (Ichsanuddin Noorsy, 2011); *Pertama*, dalam rangka mengantisipasi terjadinya krisis ekonomi Uni Eropa dan melambatnya perekonomian dunia serta menjaga kesinambungan aktivitas ekonomi nasional. *Kedua*, dilihat dari perspektif kepentingan lingkup koalisi. *Ketiga*, kepentingan SBY sendiri yakni efektivitas kebijakan sehingga kabinet berakhir sampai dengan masa jabatan. (Jawa Pos, 21/10/2011)

Perombakan kabinet bersatu jilid dua yang telah dilakukan Presiden, seharusnya bisa diharapkan memperbaiki kinerja kabinet secara total. Harapan itu antara lain bisa terwujud dimungkinkan secara nyata perubahan mendasar dan pencapaian lebih baik dari sebelumnya. Kabinet memang mesti kerja keras, masa bakti SBY dan Budiono tinggal tiga tahun adalah waktu yang cukup untuk berbuat, bekerja, dan berkarya nyata, tetapi tiga tahun juga sangat singkat jika tidak digunakan sebaik mungkin.

Jika tidak, akan membuang lagi peluang akselerasi perbaikan peri kehidupan bangsa yang terbentang luas, di tengah berbagai krisis yang dialami negara dan bangsa lain. Perombakan kabinetpun hanya jadi membenaran penilaian bahwa ini hanya sebuah komunikasi politik atau gerakan bagi-bagi jabatan menteri bagi pendukung koalisi.

Permasalahan internal sendiri yang belum dikerjakan sudah menumpuk, tentang buruknya pembangunan infrastruktur, kelangkaan energi yang terjadi di beberapa daerah, sistem logistik yang mahal, birokrasi yang berbelit, dan pungutan yang membuat pengusaha sampai kini belum juga terselesaikan secara tuntas. Penuntasan masalah memang butuh waktu panjang, tetapi setidaknya perbaikan itu harus nyata terlihat secara signifikan. Persoalan tentang pengelolaan anggaran belakangan ini semakin disoroti publik secara tajam, dan rakyat miskin dan jumlah pengangguran nyaris tak bergerak turun.

Hal tersebut terjadi karena anggaran yang dominan diperoleh dari pajak kebanyakan dibelanjakan untuk memenuhi biaya aparat pemerintahan. Alokasi belanja modal untuk pembangunan sebagai stimulus pergerakan ekonomi masih terbatas, padahal ini dibutuhkan

untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Belanja pembangunan itu pun kebanyakan jatuh sebagai biaya birokrasi dan dikorupsi.

Oleh karena itu, kesungguhan dan makna perombakan kabinet kali ini bukan dilihat dari pergantian menteri saja, reshuffle kabinet bermakna bagi rakyat kalau dilakukan dengan semangat dan agenda yang jelas dengan tingkat prioritas tinggi untuk memperbaiki tatanan politik yang sudah sangat rusak. Untuk itu, Presiden tidak perlu mengkhawatirkan bila adanya ancaman kekuatan di parlemen, sebab dengan dukungan rakyat yang cukup signifikan. Sudah barang tentu Presiden selalu dapat terjun ke masyarakat untuk menjelaskan dan meyakinkan publik setiap agenda yang berpihak kepada kepentingan umum.

Citra sejati pemerintah tidak tergantung atau terdongkrak karena pergantian menteri, tapi pemerintah harus dapat menunjukkan hasil kerja keras dan efektif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perombakan kabinet tanpa perspektif lebih mendasar terutama upaya membenahan tatanan kekuasaan yang komprehensif, dapat dipastikan hanya akan menjadikan rakyat semakin kecewa. Ini karena semua orang tahu bahwa korupsi yang dilakukan para petinggi negara sudah diawali niat para elite, melalui proses politik dan berkendaraan partai, mendapatkan kemewahan berkelimpahan.

Para elite politik mempergunakan jalan pintas, mereka dengan memberikan madu beracun misalnya bahan pokok kepada rakyat. Hanya sesaat rakyat merasakan manisnya madu, tetapi setelah itu menjadi lemas karena kekuatannya / kedaulatannya semakin lemah setelah racun mulai bekerja. Racun yang bekerja semakin melumpuhkan sendi-sendi kehidupan karena sangat mudah menjalar ke seluruh tubuh bangsa. (J.Kristiadi, Kompas 20/9/2011:15)

Meskipun perombakan kabinet dilakukan dengan gegap gempita, menggunakan proses komunikasi politik dengan penuh argumentasi, diskusi, tawar-menawar dan kompromi, belum tentu menjamin menghasilkan kabinet idaman. Sebab belum tampak indikasi pemerintah benar-bener memberantas korupsi secara radikal. Obat penyakit kanker korupsi yang sudah

masuk pada sendi-sendi kehidupan bangsa pun tidak dapat hanya diberi obat sejenis perombakan kabinet sekadarnya.

Penentuan siapa yang akan diganti anggota kabinetnya adalah hak prerogatif Presiden, namun belajar dari pengalaman dapat dipastikan akan mempertimbangkan komposisi politik, tentu demi menjaga soliditas pemerintahannya. Harapan perbaikan yang bisa diwujudkan apabila para menteri dipilih dari kalangan profesional. Presiden SBY dapat memilih para ahli dengan menelusuri rekam jejak pendidikan keahlian, pekerjaan serta karya-karya ilmiah para kandidat menteri.

Bagaimanapun, kalau alasan dan tujuan perombakan diacukan pada aspek kualitas kerja pemerintah hasilnya jauh dari harapan masyarakat, pastilah presiden telah berhitung cermat ketika mengambil langkah tersebut. Bisa saja orang berbeda pandangan dengan presiden tentang keyakinan politik atau operasionalisasinya, tanpa perlu mengurangi penghormatan kepada presiden, kepada hak-hak dan kewenangannya. Tak ada yang lebih baik selain memberi kesempatan presiden dan kabinetnya bekerja, harus diterima dalam pemahaman bahwa program yang ditawarkan sewaktu kampanye pemilihan disetujui untuk dilaksanakan.

Berhasil atau gagal dalam merealisasikan janji politik tadi adalah soal pertanggungjawaban akhir. Di luar isu pemakzulan, penilaian terhadap pertanggungjawaban tersebut tidak harus selalu dihujat pada masa tugas yang sedang berjalan. Perbedaan pandangan, pendekatan ataupun strategi pencapaian sudah lazim dalam politik.

Keinginan mewujudkan cita-cita yang mungkin berbeda tidak perlu pula diwujudkan dalam bentuk pemaksaan kehendak, gangguan ataupun tidakan negatif lainnya. Presiden harus berani mengubah sistem manajemen, tegas dalam kepemimpinan, tidak sekedar populis kebijakannya. Hal itu, harus disertai tekad bulat bahwa kebijakan itu merupakan bagian awal dari pembenahan penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan dan mendasar. Tanpa

tekad kuat seperti itu, perubahan kabinet akan mubazir dan menambah kekecewaan masyarakat.

Simpulan

Kondisi reshuffle itu menunjukkan bahwa para menteri dan wamen itu membutuhkan orientasi pekerjaan dan lingkungan sambil menjiwai makna terdalam atas tugas dan tanggung jawab atas lingkungannya.

Belum lagi perubahan struktur kementerian yang mesti menyesuaikan, menteri yang baru pun tentu butuh waktu penyesuaian. Ini adalah pekerjaan yang tidak mudah dan membutuhkan waktu minimal satu tahun, sedangkan SBY tetap menjaga koalisi walau tidak menyelesaikan akar masalah, tentang ambruknya kepercayaan publik serta melorotnya harkat dan martabat bangsa. Perombakan kabinet kali ini sekedar menolong SBY, walau hasilnya diragukan akan mampu mengangkat kembali efektivitas kebijakan.

Perwakilan terjadi dalam komunikasi politik yang menghubungkan publik dengan pemerintah dalam pembuatan kebijakan, keputusan, dan penerimaan atau penolakan. Perombakan kabinet ini dinilai sudah terlambat, seharusnya dilakukan setelah kabinet berlangsung satu tahun. Perubahan diperlukan, tetapi tentu tidak asal berubah, ada pepatah lama menyebutkan selalu memotivasi untuk terus mencapai kinerja yang lebih baik. Pencapaian pada hari ini harus lebih baik dari kinerja kemarin dan pencapaian hari esok harus lebih baik ketimbang kinerja hari ini.

Akan tetapi, bagi seorang pemimpin yang haus akan lompatan prestasi nyata dan kinerja sangat baik, bukan sekedar citra, petuah di atas tentu tidak cukup. Melainkan, pasti tidak mau menerima kinerja anak buahnya yang sekedar lebih baik dari sebelumnya seberapa kecilpun perbaikannya, karena hanya melihat pencapaian diri sendiri asal sudah berubah dari kemarin sudah cukup. Bahkan hingga sekarang belum terlihat ada indikasi dari pemerintah memberantas korupsi dengan rasa kesungguhan, hanya sampai setengah hati saja. Bukan hanya secara lisan

seperti sabda pendita ratu, asal sudah diomongkan seolah-olah segala sesuatunya akan terjadi dengan sendirinya.

Pemerintah harus memposisikan diri dalam peran memberikan fasilitas, kemudahan dan kesempatan. Dengan menciptakan kondisi politik dan keamanan yang kondusif, adanya kepastian, penegakan hukum dan kebijakan pemerintah yang konsisten dan jelas. Selain itu, pemerintahan yang amanah harus melaksanakan konsepsi akuntabel, transparansi, partisipasi dan keadilan dalam rule of law.

Daftar Pustaka

Ambar Teguh Sulistiyani, 2004, Memahami Good Governance dalam Perspektif Sumber Daya Manusia, Gava Media, Yogyakarta,

Dan Nimmo, 1989, Komunikasi Politik, Remaja Karya, Bandung.

Ichsanuddin Noorsy, 2011, Reshuffle Tak Tuntaskan Akar Masalah, Jawa Pos (21/10), Surabaya.

J. Kristiadi, 2011, Perombakan Kabinet Bukan Obat Balsem, Kompas (20/9), Jakarta.

Lely Arrianie, 2010, Komunikasi Politik, Widya Padjadjaran, Bandung.

Meriam Budiardjo, 2010, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Onong Uchjana Effendi, 1986, Dinamika Komunikasi, Remaja Karya, Bandung.

Ramlan Surbakti, 1992, Memahami Ilmu Politik, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Siti Zuhro, 2011, Kompas (20/12), Jakarta.